

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

AMELIA FEBRIANA / D 101 08 369

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan identifikasi masalah mengenai pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga di kantor kepolisian resort Palu dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian resort Palu, dan faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Palu Sulawesi Tengah khususnya di kantor kepolisian resort Palu dengan metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di kota Palu sendiri pelaksanaan perlindungan saksi dan korban khususnya bagi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh para penegak hukum dengan mematuhi semua aturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang pantas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan saksi itu sendiri menurut hasil penelitian ada dua yaitu faktor penghambat dimana masyarakat belum sadar akan hukum sedang faktor pendukungnya yaitu dimana aparat kepolisian yang ikut mengambil bagian dalam menangani setiap kasus KDRT yang dilaporkan sehingga aparat kepolisian menegakkan hukum secara adil terhadap korban KDRT.

Kata Kunci : *perlindungan saksi dan korban, kekerasan dalam rumah tangga*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi merupakan salah satu alat bukti sah yang harus ada dalam suatu proses persidangan, peranan seorang saksi dalam persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat memberikan inspirasi dan kontribusi bagi hakim di pengadilan, karenanya hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat dari tempat hukum diciptakan, yaitu ide keadilan¹.

Saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah

keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi sehingga selalu mendapat perhatian yang besar baik oleh aparat hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Karenanya, sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana, seorang saksi sangat dibutuhkan.

Tetapi kenyataannya, dalam perundang-undangan Indonesia, perlindungan terhadap saksi belum mendapat perhatian yang besar. Banyak kasus yang terjadi dimana saksi yang memberikan keterangan malah dilapor balik oleh tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik atau keterangan palsu dan saksi

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 18

yang diteror oleh pihak tersangka. Hal ini seharusnya menjadi Pekerjaan Rumah bagi pihak penegak hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang saat ini menjadi sorotan dari berbagai pihak, perilaku ini menjadi semakin memprihatinkan karena pelaku kekerasan sering kali adalah orang terdekat korban dan terjadi diwilayah yang harusnya menjamin kenyamanan setiap penghuninya. Karenanya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga secara khusus bagi perempuan.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan kemudian menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ implementasi perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga di kantor kepolisian resort Palu ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian saksi, Korban dan kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum yang berlaku, hukum juga menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta apa saja yang dilarang. Diluar itu, hukum di Indonesia tetap mengedepankan hak asasi manusia, setiap terlapor dari suatu tindak pidana berhak mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya, dan juga saksi atau korban dari suatu tindak pidana juga berhak mendapat perlindungan dari pihak kepolisian.

1. Saksi

KUHP memberikan definisi saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan dari suatu perkara pidana. Defenisi tersebut cukup luas atau umum sehingga saksi bisa menjadi korban itu sendiri, pelapor, pengadu maupun orang lain yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun dimuka sidang pengadilan.

Adapun pengertian saksi secara luas dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah yaitu : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.²

Sebagaimana yang kita ketahui, jumlah penyidik sangatlah terbatas apabila dibandingkan dengan besarnya jumlah perkara pidana yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan keterangan saksi yang akurat dan dapat membantu proses penyidikan. Adapun beberapa syarat yang harus memenuhi syarat menjadi seorang saksi yang bernilai yustisial yaitu :

1. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa
2. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial

Saksi sebagai alat bukti yang sah, tentunya memiliki hak yang harus mereka dapat baik pada saat sidang berlangsung atau diluar sidang, dan hak ini harus dipenuhi oleh pihak berwajib atau pihak penegak hukum, adapun hak yang dimaksud adalah :

²Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi pelanggaran HAM yang berat sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 26 tahun 2000 pasal 1 butir 3 tentang Pengadilan HAM

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - d. Mendapat penerjemah
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
 - i. Mendapat identitas baru
 - j. Mendapat nasihat hukum
 - k. Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berlangsung.
2. Korban

Selain dari saksi, pada saat pengadilan ada hal lain yang sangat penting juga, yaitu korban, dalam beberapa kasus korban dan saksi bisa berbeda tetapi ada juga saksi dan korban bisa jadi orang yang sama, korban memiliki arti seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana³.

Siapa sajakah yang menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ? yang menjadi korban bisa jadi seorang istri dan anak, walaupun dalam beberapa kasus suami juga menjadi korban tetapi kebanyakan pihak yang menjadi korban adalah kaum perempuan.

Seperti halnya saksi, korbanpun memiliki hak yang harus dipenuhi, dan sekali lagi yang harus memenuhi hak tersebut adalah pihak penegak hukum, adapun hak yang dimiliki korban adalah :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun

- berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban berkewajiban untuk melaporkan apa saja yang dialaminya, seperti yang dikatakan dalam penjelasan mengenai saksi tadi, karena saksi bisa juga menjadi korban.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
Merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴

Siapa sajakah yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam undang-undang, yaitu :

1. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang yang mempunyai hubungan kerja dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam suatu rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan)
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)

Percaya atau tidak, tindak kekerasan dalam rumah tangga berdampak buruk bagi korban atau anak-anak yang bersangkutan, tetapi banyak isteri atau korban atau saksi yang enggan melaporkan kejadian ini

³UU No. 13 tahun 2006 Pasal 1 ayat (2)

⁴UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan. Hal ini sangat memprihatinkan dan tindak kekerasan ini kian hari kian meningkat jumlahnya

Menurut Muladi⁵ Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat yang tidak sederhana, seperti hilangnya kepercayaan diri, menghambat kaum wanita untuk bersosialisasi, terganggunya kesehatan dan mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya..

Dalam kasus KDRT, dikatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga, hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum dan mayoritas 45,2% memutuskan pindah rumah dan 10,9% memilih diam⁶

B. Jenis dan Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

. Setelah membaca pengertian dari KDRT tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik saja tetapi juga psikis, seksual dan ekonomi. Ini berarti tidak hanya istri yang tidak bekerja dan bergantung pada suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga pada istri yang bekerja.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu ;

1. Kekerasan fisik, adalah suatu tindakan kekerasan yang menyebabkan sakit, luka atau cacat pada tubuh istri dan bisa berakibat pada kematian
2. Kekerasan psikis adalah suatu penyiksaan dalam bentuk ucapan sehingga menurunkan rasa percaya diri dan meningkatnya rasa takut istri atau korban.

3. Kekerasan seksual, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai

4. Kekerasan ekonomi yaitu tindakan yang membatasi korban untuk bekerja didalam atau diluar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri/anak/suami yang bekerja untuk dieksploitasi sementara pelaku tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Di Indonesia, khususnya di kota Palu telah banyak dijumpai kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, padahal seharusnya keluarga merupakan tempat yang paling nyaman untuk setiap orang, bukan menjadi tempat yang seperti neraka, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Aspek ekonomi, dilihat dari aspek ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kemiskinan, gaji istri lebih banyak dari suami, mempekerjakan anak atau istri dengan tidak wajar sementara suami hanya diam saja, dapat juga terjadi karena istri sangat bergantung pada suami hingga menimbulkan sikap semena-mena suami karena merasa dibutuhkan, atau juga karena faktor kesibukan suami dan istri hingga adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga.
2. Aspek sosial budaya, yaitu sikap yang membedakan antara status suami dan istri dalam suatu keluarga, memang suami harus dihormati dalam kehidupan rumah tangga, tetapi apabila seorang istri diperlakukan seperti pembantu karena sikap harus hormat pada suami maka hal itu menjadi tidak wajar, ada juga sikap yang mendidik seorang anak dengan kekerasan hingga menimbulkan perasaan benci kepada orangtuanya.
3. Aspek politik, mencakup dari pengambilan keputusan dalam keluarga yang hanya didominasi oleh satu orang saja tanpa memikirkan anggota keluarga yang lainnya

⁵Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, Hal.40

⁶Pernyataan menteri negara pemberdayaan perempuan dan catatan mitra perempuan dan soedjendro 2005

4. Kepribadian suami atau istri yang tidak stabil atau tidak sehat
5. Masa lalu suami atau istri yang juga pernah mengalami masa kekerasan.

C. Teori yang Berkaitan Dengan Perlindungan Saksi, Korban dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang dialami oleh korban KDRT secara terus menerus bisa membuat korban memutuskan untuk tidak bersama dengan si pelaku lagi apapun alasannya, ada beberapa teori dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Teori kekerasan, hal yang membuat seseorang korban menjadi tidak tahan dengan perlakuan pelaku, hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi, psikologis dan juga faktor eksternal seperti dorongan dari orangtua
2. Teori psikologis yaitu efek yang dialami oleh pelaku, korban dan saudara terdekat dari korban atau pelaku, bisa jadi anak atau orangtua
3. Teori mengenai ketidakadilan bagi anak, bagaimanapun dalam proses perceraian anak selalu menjadi korban, dan juga tidak jarang anak selalu menjadi pihak yang tersiksa baik secara bathin maupun fisik.

Apunan alasannya, KDRT seharusnya tidak terjadi dalam keluarga, apabila ada masalah KDRT yang belum terlalu membesar, sebaiknya anggota keluarga mulai menyadari dan mulai diselesaikan dengan baik agar tidak menyebar dan menyebabkan kekacauan.

D. Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu oknum penegak hukum yaitu Briptu Robin Panjaitan pada tanggal 5 April 2013, penulis mendapat informasi bahwa pihak penegak hukum telah melakukan tugas perlindungan saksi dan korban sebagaimana mestinya dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Banyak hal yang dilakukan, seperti melindungi status dari saksi, bahkan pada saat wawancara, mereka tidak menyebutkan siapa saja korban dalam kasus KDRT. Semua itu

dilakukan agar pihak korban atau saksi merasa nyaman dan aman serta tidak ada keraguan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Tetapi, diakui oleh Robin Panjaitan, bahwa pengertian masyarakat mengenai pentingnya seorang saksi dipengadilan masih sangat redah, banyak saksi yang penting malah mangkir dari tugasnya karena lebih mementingkan bisnisnya atau kerjaannya, mereka tentu tidak mau rugi karena pergi menjadi saksi dalam proses persidangan.

Menyikapi kasus tersebut, pihak kepolisian harus lebih sigap lagi untuk mengganti dana yang harus mereka dapatkan atau memberikan dana pengganti pada saksi yang bekerja.

Sampai saat ini, kejadian kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah tangga adalah pemukulan, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dan pihak kepolisian biasanya langsung memproses setiap kasus yang dilaporkan dan memeriksa para tersangka dan saksi.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak faktor yang memainkan peran penting pada proses perlindungan saksi dan korban, yaitu :

1. Faktor penghambat

Menurut Harkristuti terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain karena:

- a. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi karena keengganannya terlibat dalam proses peradilan
- b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan
- c. Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan satu saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku

- d. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan pada perempuan⁷

Faktor yang menjadi penyebab mengapa korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi yaitu sikap kasihan dan tidak mau aib keluarganya di bebankan didepan umum.

Selain dari faktor diatas, ada beberapa faktor lain, yaitu :

- a. Korban menyadari dirinya menjadi korban kekerasan akan tetapi tidak bersedia melapor karena menganggap masalah yang dihadapi adalah urusan pribadi sehingga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan agar tidak mencemarkan nama baik keluarga
- b. Korban tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban dari tindak kejahatan seperti dalam kasus perzinahan
- c. Korban yang bersikap mau tidak mau atau abstrak sehingga sulit ditentukan secara jelas
- d. Korban juga ikut dalam tindak kejahatan tersebut atau tindak kejahatan dalam kasus lain

Adanya kecenderungan sifat korban atau saksi yang pasif dan bahkan non-kooperatif dengan aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak dan perlindungan hukum korban atau saksi kejahatan.

Belum lagi ditambah dengan kecenderungan yang mengakibatkan kurangnya dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana, sikap kurang loyal tersebut akan lebih mengemuka apabila korban harus berfungsi sebagai saksi dan memberikan saksi secara benar dibawah sumpah, tetapi apabila ternyata kesaksian dari korban atau saksi mata tidak benar atau palsu dan memberatkan terssangka atau terdakwa, ia akan diancam dengan penjara

maksimal sembilan bulan dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu.

Dalam kasus yang terjadi, masih belum ditemukan adanya pemberian hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas kejadian yang mereka alami. Berkaitan dengan masalah kompensasi ini Victimologi melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Hal ini adalah sangat penting karena menyangkut nasibnya.⁸

Beberapa kendala lain dalam Penanganan Korban KDRT, meliputi:⁹

1. Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana
2. Demikian halnya terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga;
3. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT; tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT;
4. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum

⁸Ika Nurdevi Wibawanti, *Relevansi Victimologi Dengan Evaluasi Pengaturan Ganti Kerugian Terhadap Korban*, Jakarta, 2007 hlm 24

www.google.com

⁹Mudjiati "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 5 No. 3 September 2008 hlm.65

⁷Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166.

menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum;

5. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk bangunan maupun operasionalnya;
6. Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT belum mengandung efek jera. Dalam beberapa kasus (khususnya KDRT psikis) hakim menjatuhkan pidana cukup ringan karena hanya melihat kondisi luar korban tanpa mencoba menggali penderitaan korban (di dalam).

Karena itu, mestinya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana senantiasa memiliki tanggungjawab berupa tanggungjawab hukum untuk menegakkan hukum dan tanggungjawab moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bila terjadi penyimpangan terhadap kedua tanggungjawab tersebut maka akan menimbulkan efek negatif terhadap pihak korban dan tersangka

Selanjutnya, kendala yang dialami yaitu keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban yang harusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan bagi saksi dan korban yang belum berdiri di daerah kecil atau kota kecil, LPSK hanya ada di kota tertentu, sedangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini juga banyak terjadi di daerah yang masih belum berkembang, seperti daerah kecil. Mengapa demikian? Karena pada daerah tertentu, masyarakat masih awam akan hukum, belum mengerti mana yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga mana yang tidak, terkadang masyarakat menyimpan rapat-rapat tindak kriminal yang dialami tanpa diketahui oleh orang lain.

2. Faktor pendukung

Adapun faktor yang menjadi pendukung proses pelaksanaan perlindungan saksi dan korban adalah kesadaran dari pihak berwajib untuk

melaksanakan peraturan yang ada. Dimana pihak yang berwajib mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat untuk memperkenalkan apa saja hal yang seharusnya dilakukan orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

Juga semakin canggihnya teknologi, yang membuat masyarakat semakin mengerti tentang hukum dan akibat yang akan dialami apabila melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga melalui teknologi seperti internet, televisi dan koran, maka masyarakat semakin dekat dan peka terhadap informasi yang ada disekitar.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di kota Palu, perlindungan bagi saksi dan korban telah berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada. Saksi di rahasiakan identitasnya dan di berikan hak sesuai dengan undang-undang, walaupun tetap memiliki kendala dalam menjalankan perlindungan, tetapi pada dasarnya pihak kepolisian Resort Palu telah menjalankan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Tetapi, tetap saja tindak kekerasan dalam rumah tangga masih banyak ditemui di Indonesia terlebih khusus di Kota Palu, masih banyak keluarga yang melakukan tindak kekerasan tetapi tidak diketahui dan tidak diperkarakan, karena itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menuntaskan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti faktor pendukung yaitu kesadaran dari pihak berwajib untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan memperkenalkan kepada masyarakat apa saja yang termasuk dalam tindak pidana dan apa saja sanksi yang diterima bagi pelanggar khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan ada juga faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari pihak korban

atau saksi untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal seperti ini tentu harus secepatnya diantisipasi oleh pihak berwajib dan dibantu oleh masyarakat agar lebih sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 2000.
- Ika Nurdevi Wibawanti, Relevansi Victimologi Dengan Evaluasi Pengaturan Ganti Kerugian Terhadap Korban, Jakarta, 2007.
- Mudjiati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
- UU perlindungan saksi dan korban No. 13 tahun 2006
- UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004

C. Sumber Internet

- <http://www.pemantauperadilan.com> Pernyataan menteri negara pemberdayaan perempuan dan catatan mitra perempuan dan soedjendro 2005

BIODATA

AMELIA FEBRIANA, Lahir di Palu, 28 Februari 1990, Alamat Rumah Jalan Karajalemba Perum. Banua Asri, Nomor Telepon +6285299764542, Alamat Email feby_mey@yahoo.com

